

Analisis Peran *Stakeholder* dalam pengembangan Kepulauan Widi

1 Adi Muliadi^{1,*}, 2 Soeryo Adiwibowo², 3 Yonvitner³

¹Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 16144, Indonesia

²Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 16144, Indonesia

³Departemen Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 16144, Indonesia

Sejarah Naskah

Diterima
19-06-2022
Revised
13-07-2023
Accepted
25-07-2023
Available online
16-10-2023

Keywords

Widi Islands;
Management;
stakeholders;
mactor

Abstract. The Widi Islands have abundant natural resource potential but are faced with very complex threats, one of the worrying threats that attracts public attention and is related to the privatization of the region today is the issue of the Widi Islands auction case. **Objektive:** analyze the role and authority of stakeholders in the development of the Widi Islands. **Method and results:** This research uses empirical paradigm and qualitative approach with primary data collection through in-depth interviews and FGDs as well as documentation studies which are then analyzed using software mactor. **Conclusion:** The results of the study show that the key actors who have high influence and low dependency are the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP), Non-Governmental iOrganizations (NGOs), and the private sector. Then actors who a have high level of influence and dependency are the Director General of Marine Spatial Management (DJPRL), Regional Marine Protected Areas Center (BKKPD), Regional Government (PEMDA). Meanwhile, actors with a high level of dependency and little influence are the Maritime Affairs and Fisheries Service (DKP), the Tourism Office (DISPAR), community supervisory groups (POKMASWAS), and fishermen.

* Corresponding author: author@domain.com

1 Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang mempunyai sumberdaya alam yang potensial. Kepulauan Widi merupakan salah satu kepulauan yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah. Kepulauan Widi terdiri dari gugusan pulau yang berada pada bagian barat Kepulauan Raja Ampat (Papua Barat) dan bagian tenggara Pulau Halmahera. Kepulauan Widi terdiri dari 2 gugusan pulau, salah satunya adalah Gugusan Pulau Widi. Totalnya terdiri dari 83 pulau di sekitar Kepulauan Widi dan 3 pulau di lepas pantai Halmahera Selatan serta dua atol [1].

Kepulauan Widi memiliki potensi ekosistem perairan yang sangat beragam [2]. Kepulauan Widi sebagian besar merupakan pulau tak berpenghuni, hanya pada Pulau Daga yang teridentifikasi memiliki penduduk tetap sekitar 15 Kepala keluarga. Selain itu, perairan Kepulauan Widi merupakan rumah bagi hewan karismatik semisal lumba-lumba, hiu, pari, dugong dan hiu paus, serta minke biru dan paus sperma yang hidup dan bermigrasi di perairan sekitarnya [3]. Kepulauan Widi merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 102/Kepmen/KP/2020.

Potensi yang dimiliki Kepulauan Widi dalam bingkai kawasan ekowisata bahari adalah sebesar 88,57%, seperti keindahan alam yang masih natural, alami dan *exotic*, serta biota perairan dengan keanekaragaman yang besar [4]. Akan tetapi dengan semua potensi tersebut, ancaman terhadap sumber daya dan pemanfaatan yang tidak sacara adil bagi seluruh elemen (privatisasi kawasan) di Kepulauan Widi juga masih besar. Salah satu ancaman mengkhawatirkan yang menyedot perhatian publik dan berkaitan dengan privatisasi kawasan saat ini adalah isu terhadap kasus pelelangan Kepulauan widi. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, terlihat dari banyaknya pulau - pulau kecil Indonesia yang jadi subjek perdagangan di dunia virtual. Jika ditelisik kebelakang kasus jual beli pulau kepada pihak asing sudah sering terlihat diantaranya, jual beli pulau lantigiang di sulawesi selatan, pulau gambar, pulau gili naggu, pulau ajap, dan tiga pulau di mentawai 2009 pada situs www.privateislandonline.com [5].

Dalam rangka proses kerjasama investasi pada pengembangan Kepulauan Widi setelah wabah pandemi, PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) sebagai salah satu *stakeholder* yang diberikan izin untuk mengelola dan mengembangkan Kepulauan Widi mengambil langkah untuk membuka kerjasama melalui situs lelang *Sotheby's Auction Concierge* (SAC) dalam rangka mengelola kepulauan widi. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak terhadap eksploitasi sumber daya alam, pembatasan aktivitas masyarakat, dan juga dapat mengancam kedaulatan negara [6].

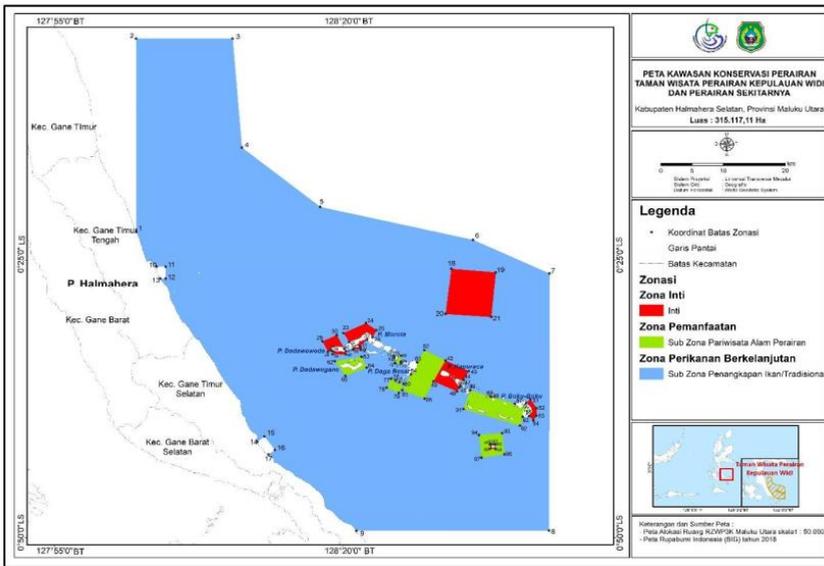
Kepulauan Widi merupakan Pulau-Pulau Kecil yang juga sebagai anugerah dari sang pencipta dan negara sebagai pemilik tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan demi kebermanfaatan untuk kemakmuran rakyat di masa kina dan juga dimasa kedepan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola lingkungan hidup dengan berlandaskan pada hak konstitusional berdasar pada UUD 1945, Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat secara luas. Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa negara menguasai sumber daya alam. Pengelolaan itu berarti bagaimana negara memimpin bukan malah bertindak sebagai pemilik. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola (*regelen en besture*) sumber daya alam untuk kepentingan rakyat [7].

Merabaknya kasus yang terkait pulau-pulau kecil yang kepemilikan serta pengelolaannya dilakukan oleh pihak asing wajib menjadi atensi bersama. Hal ini tidak hanya menyangkut pada ancaman dalam kedaulatan negara tetapi juga kedaulatan maritim pula. Wilayah kepulauan yang disekitarnya terdapat panorama keindahan laut mempunyai daya tarik tersendiri untuk pariwisata dan juga keanekaragaman hayati lainnya, tidak terkecuali pada Kepulauan Widi. Apabila pulau-pulau itu diakusisi ataupun dikembangkan oleh pihak asing maka eksploitasi terhadap sumber daya perairan akan tidak terkendali dengan alibi hak kepemilikan secara individu.

Oleh sebab itu sangat penting untuk mengidentifikasi peran dan pengaruh dari *stakeholder* guna pengembangan Kepulauan Widi secara berkelanjutan serta untuk menghindarkan dari tumpang tindih tanggung jawab diantara *stakeholder*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan wewenang *stakeholder* terhadap pengembangan Kepulauan Widi.

2 Metode Penelitian

2.1 Lokasi Penelitian



Gambar 1. Peta dan batas masing masing zona di Taman Wisata Perairan Kepulauan Widi

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan november 2022– april 2023. Paradigma yang digunakan dalam riset ini adalah paradigma empiris dalam analisis kebijakan yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif guna memperoleh cerminan secara holistik tentang karakteristik persepsi dari *stakeholder* yang terkait dengan pengembangan Kepulauan Widi.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data Primer melalui wawancara mendalam (*In-dept interview*) dan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan *stakeholder* yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kasus dan pengembangan Kepulauan Widi. Wawancara dan FGD dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) melalui platform Zoom Meeting. Data sekunder diperoleh dari studi literatur/dokumentasi (*library research*) melalui analisis isi (*Content Analysis*) mengenai dokumen-dokumen yang terkait dengan Kepulauan Widi.

2.3 Metode analisis Data

Dalam proses-proses pendekatan prospektif, pemikiran *objective*, pemangku kepentingan memainkan peran penting. Adapun maksud dari analisis prospektif yaitu guna penentuan peringkat dan posisi pemangku kepentingan pada isu-isu yang bersifat strategis, melakukan penilaian terhadap konvergensi serta divergensi, dan mengantisipasi potensi gabungan dan potensi perpecahan [8].

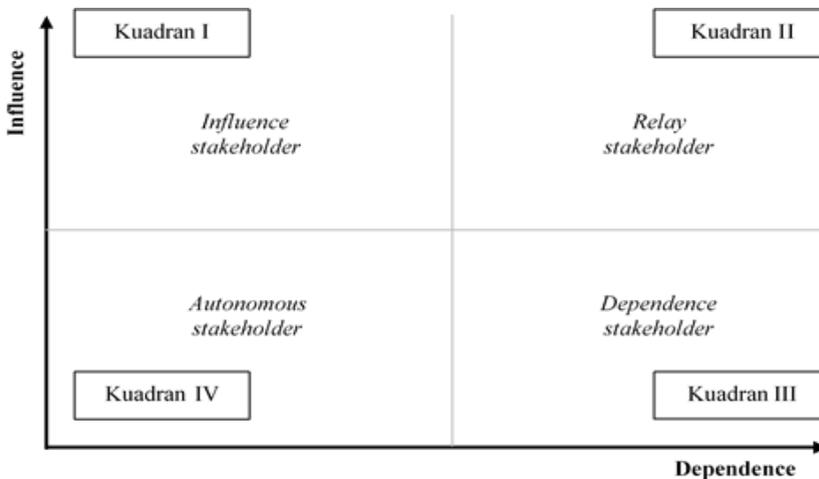
Semua informasi pada riset ini dianalisis menggunakan *tools mactor* (*Matriix of Aliances and Conflict Tactics, Objectiives and Recomendations*) yang dikembangkan oleh Michel Godet (1991) guna menganalisa secara lebih mendalam terkait hubungan kuasa antar pemangku kepentingan, daya saing pemangku kepentingan, serta persepsi pemangku kepentingan pada tujuan. Teknik dalam *tools mactor* dideskripsikan berdasar pada tiga input utama yang berbentuk matriks. Ketiga input ini didasarkan pada hubungan pengaruh antar pemangku kepentingan satu dan yang lainnya. Pengaruh pemangku kepentingan A terhadap pemangku kepentingan D merupakan penjumlahan secara langsung dari A ke D atau secara tidak langsung melalui B dan C.

Data masukan diperoleh dari FGD dan wawancara serta disusun dalam bentuk matriks yang setelah itu diolah memakai fitur lunak Mactor buat menciptakan bermacam hasil analisa. Hasil analisa dihadirkan dalam wujud diagram serta bagan

yang mendefinisikan kemampuan, respon, ikatan, daya saing, gambaran pola aliansi, serta kemungkinan friksi antar pemangku kepentingan dan deskripsi mengenai support pemangku kepentingan kepada tujuan yang akan direalisasikan.

Tahapan dalam analisis mactor dijelaskan sebagai berikut:

1. Penentuan pemangku kepentingan-pemangku kepentingan didalam sistem;
2. Penentuan perangkat- perangkat tujuan;
3. Menggambarkan relasi kuasa para pemangku kepentingan yang diukur dalam skala dari 0 (tidak berpengaruh) sampai 4 (sangat berpengaruh);
4. Mendeskripsikan perilaku(nilai resistensi) pemangku kepentingan kepada tujuan yang diukur dalam skala (+) pendukung,(0) netral, serta(-) rival, serta artinya tujuan untuk pemangku kepentingan dalam skala 0(tidak bernilai)-4(sangat bernilai) [9].



Gambar 2. Pengelompokan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan tingkat ketergantungan

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Deteksi Pemangku kepentingan Terkait Pengembangan Kepulauan Widi

Analisis *stakeholder* dilakukan untuk melihat hubungan dan peran antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Kepulauan Widi sesuai dengan

kepentingan (objektif) masing-masing pemangku kepentingan. Terdapat tiga objektif yang berasal dari studi literature dan hasil diskusi dengan key person. Ada 10 pemangku kepentingan yang terkait dalam perubahan status zona inti KKP3K yang perlu dianalisis untuk menghindari konflik antar kepentingan dan tumpang tindih kebijakan yang dapat mengancam keberlanjutan pengembangan Kepulauan Widi. Analisis *stakeholder* dilakukan untuk melihat pengaruh dan ketergantungan antar *stakeholder* yang terlibat. Posisi pemangku kepentingan dapat dinilai dari seberapa besar tingkat pengaruh dan tingkat ketergantungan masing-masing pemangku kepentingan terhadap pemangku kepentingan lainnya [10].

Berdasarkan dari hasil dalam proses *focus group discussion* (FGD) dan wawancara multistakeholder yang telah dilakukan secara daring (dalam jaringan), teridentifikasi 10 pemangku kepentingan yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengembangan di Kepulauan Widi. Para pemangku kepentingan tersebut diurutkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi pemangku kepentingan

No	Pemangku kepentingan	
	Long Name	Short Name
1	Kementerian kelautan dan perikanan	KKP
2	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	DJPRL
3	Pemerintah Daerah	PEMDA
4	Dinas kelautan dan perikanan	DKP
5	Dinas pariwisata	DISPAR
6	Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah	BKKPD
7	Kelompok masyarakat pengawas	POKMASWAS
8	Lembaga swadaya masyarakat	LSM
9	Swasta	Swasta
10	Nelayan	Nelayan

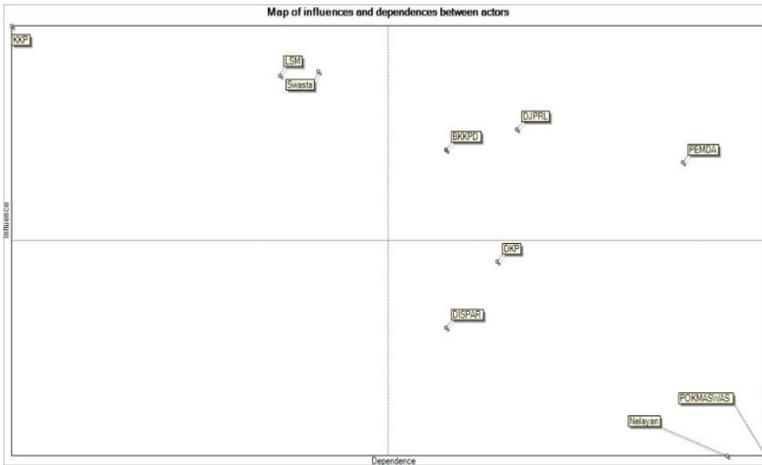
3.2 Peta Pengaruh Dan Ketergantungan Antar Pemangku kepentingan

Berdasarkan hasil penelitian, pada pemetaan pemangku kepentingan yang terlihat pada gambar 1 menunjukkan bahwa, posisi pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan ketergantungannya. Semakin tinggi aktor mempunyai

pengaruh semakin tinggi, sedangkan semakin ke kanan aktor mempunyai ketergantungan yang tinggi.

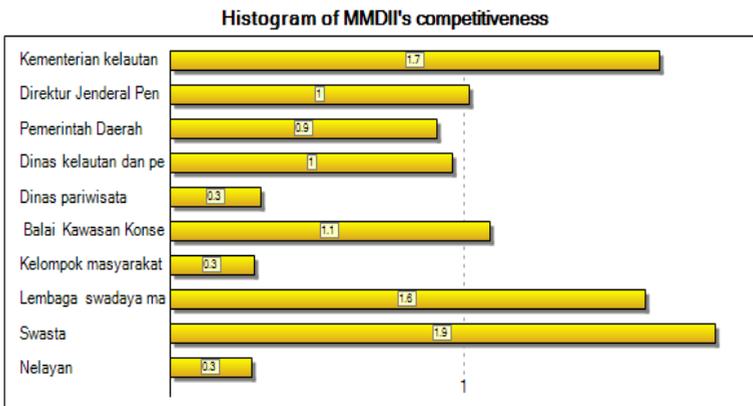
Berdasarkan gambar 1, pemangku kepentingan yang terdapat pada kuadran 1 (*influence stakeholder*) yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan swasta. Semua *stakeholder* di kuadran ini memiliki pengaruh yang besar dan ketergantungan yang rendah terhadap pengembangan Kepulauan Widi. Pada Kuadran 2 (*relay stakeholder*), pemangku kepentingan yang terdapat dalam kuadran ini yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKCPD), Pemerintah Daerah (PEMDA). Semua *stakeholder* di kuadran ini memiliki tingkat pengaruh dan kewenangan yang besar. Sebaliknya, pada Kuadran 3 (*dependence stakeholder*), pemangku kepentingan yang terdapat dalam kuadran ini yaitu Dinas kelautan dan perikanan (DKP), Dinas Pariwisata (DISPAR), Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), dan nelayan. *Stakeholder* di kuadran ini mempunyai tingkat ketergantungan besar dan pengaruh yang rendah pada pengembangan Kepulauan Widi.

Dalam permasalahan perampasan pulau-pulau terluar di Indonesia dapat diantisipasi dengan memaksimalkan andil dari instansi terkait (Pusat dan regional) dalam melindungi serta melestarikan pulau-pulau kecil dan terluar. Pemerintah pusat dapat bertindak sebagai pengkoordinir pemangku kepentingan lainnya dalam penindakan permasalahan sewa-menyewa pulau serta tetap menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya alam. Tiap individu dan perusahaan yang memiliki keinginan untuk melakukan investasi harus mentaati aturan dari pemangku kepentingan setempat. pentingnya konseling serta materi terkait penerapan sikap nasionalisme serta patriotisme mengenai pengurusan area dengan senantiasa memajukan pada norma keberlanjutan serta keletarian dan eksploitasi dengan cara seimbang [11].



Gambar 2. Peta pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh dan ketergantungan.

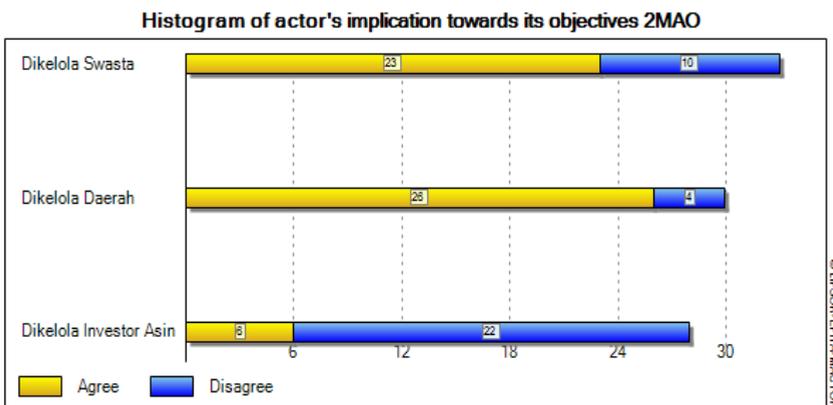
Berdasarkan hasil dari analisa mactor pula bisa diketahui tingkatan daya saing tiap-tiap pemangku kepentingan dengan memperhitungkan akibat serta ketergantungan langsungnya berdasarkan pada skala nilai. Semakin kompetitif seorang pemangku kepentingan maka semakin besar skalanya. Daya saing para pemangku kepentingan diketahui dari histogram daya saing antar pemangku kepentingan. Peta daya saing sekaligus menunjukkan kesediaan aktor menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan aktor lain [12].Kemudian skala juga dapat dibuat dari diagram daya saing MDII yang dapat memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap tujuan serta mungkin tiap pemangku kepentingan yang sukses menggapai objective(tujuan), seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Histogram daya saing MDII

Berdasarkan derajat indeks nilai daya saing yang diperoleh pada Gambar 3 memperlihatkan bahwa, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan swasta merupakan pemangku kepentingan yang mempunyai daya saing paling besar terhadap kemungkinan pencapaian pada tujuan dari pengembangan di Kepulauan Widi dengan nilai masing-masing adalah 1.7, 1.6, 1.9. Posisi kuadran ke 2 pemangku kepentingan tersebut (Gambar 2) berada pada kuadran pertama, artinya memperlihatkan pengaruh yang besar namun dengan derajat ketergantungan rendah pada pemangku kepentingan yang lain sehingga, lebih potensial untuk mencapai tujuan.

Selain derajat mobilitas, mactor juga memperhitungkan reaksi pemangku kepentingan terhadap masing-masing *objective* (tujuan), dimana para pemangku kepentingan akan menentukan apakah pengembangan Kepulauan Widi tersebut mendapat dukungan atau sebaliknya, terjadi penolakan. Semakin besar derajat mobilitas pemangku kepentingan terhadap tujuan, maka blok warna kuning akan terlihat penuh. Begitupun sebaliknya, jika ada beberapa pemangku kepentingan yang tidak setuju terhadap satu atau lebih tujuan strategis tersebut, maka akan terlihat pada gambar histogram yang ditunjukkan dengan blok warna biru seperti ditampilkan pada gambar 4 dibawah ini.



Gambar 4. Reaksi para pemangku kepentingan terhadap *objective*

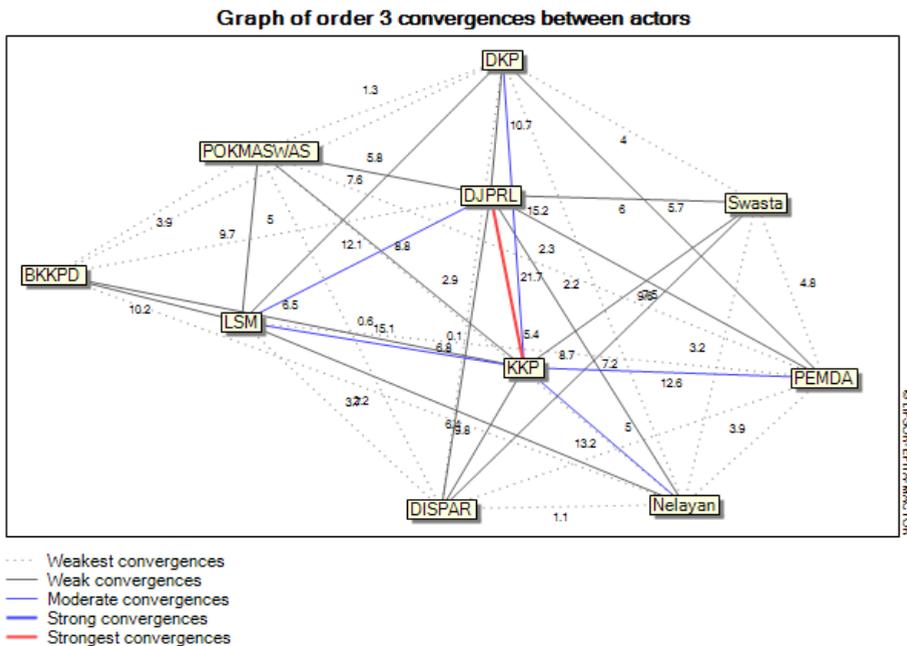
Pada gambar 4 diatas menunjukkan bahwa ketiga tujuan mendapat reaksi penolakan (*disagree*) dan setuju (*agree*) dari para pemangku kepentingan. Hal ini terkait dengan ketiadaan instrument hukum yang secara tegas mengatur tentang

boleh tidaknya kepemilikan pulau-pulau kecil oleh pihak tertentu merupakan masalah yang bermuara pada berbagai modus untuk pelegalan kepemilikan pulau-pulau kecil oleh pihak tertentu [13]. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang mempunyai karakteristik menarik tetapi rentan terhadap ancaman baik secara alami maupun dalam konteks kepentingan, ekonomi dan sosial serta ancaman terhadap lingkungan akibat dari pemanfaatan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan. [14].

Penerimaan (*agree*) paling besar dan penolakan (*disagree*) paling rendah yaitu pada tujuan pengembangan Kepulauan Widi oleh daerah dengan nilai 26 (*agree*) dan nilai 4 (*disagree*). Hal tersebut dilandaskan pada Lahirnya kebijakan terkait otonomi daerah yang kemudian mengalihkan sebahagian urusan pemerintah pusat menjadi bagian pemerintahan daerah, salah satunya dalam hal pengelolaan dan perizinan di sektor kelautan, khususnya di wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Kewenangan tersebut di dasarkan kepada Undangn -Undang No. 23/2014, Undang -Undang No. 1/2014, dan PERMEN No. 8/PERMEN-KP/2019 [15]. Perihal sepakat dan ketidaksepakatan terhadap tujuan sesungguhnya suatu yang alami, yang dalam batasan durasi khusus bisa bernilai lebih positif kepada perkembangan dalam input suatu aturan.

Pada analisis pemangku kepentingan dihasilkan pula analisis konvergensi antar pemangku kepentingan. Gambar 5 menunjukkan hasil analisa konvergensi (3CAA) dari pemangku kepentingan-pemangku kepentingan (*valued convergence*). Matriks tersebut mengungkapkan berbagai kemiripan posisi yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan. Nilai didalam matriks menyuguhkan kualifikasi konvergensi antara satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan yang lain. Jika nilainya menunjukkan semakin besar maka besar pula kesamaan dalam kepentingan dan tujuan yang dimiliki para pemangku kepentingan. Dari hasil analisis pada konvergensi dapat diketahui kemungkinan dalam terbentuknya kerjasama di antara para pemangku kepentingan.

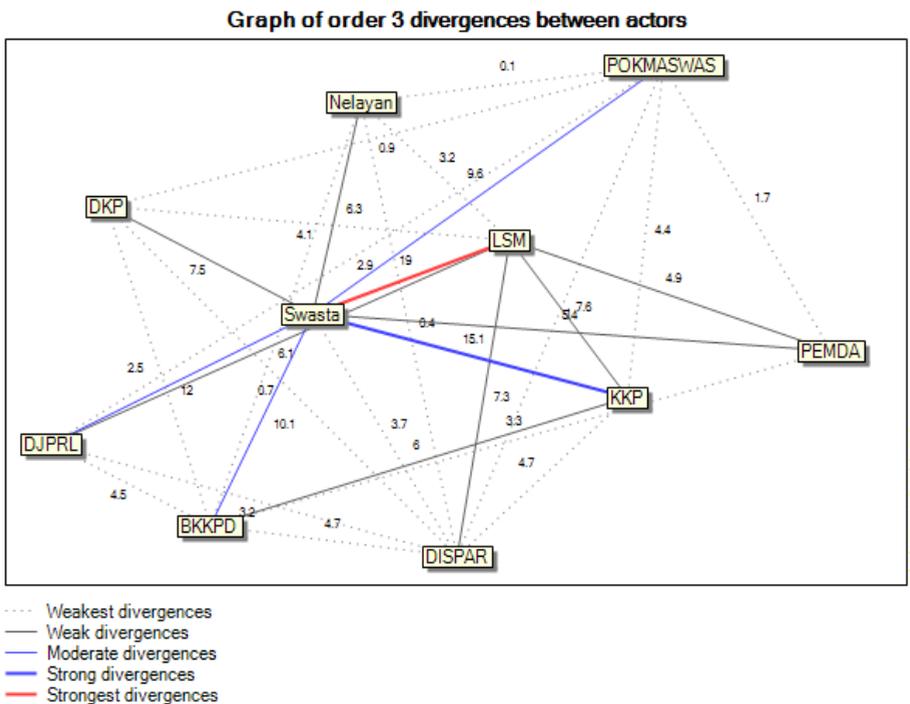
Posisi pemangku kepentingan (pemangku kepentingan) terkait konvergensi terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan peta konvergensi Gambar 5. Terlihat bahwa, semakin besar nilai matriksnya maka semakin tebal garis pada koneksi peta dan hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat konvergensi diantara keduanya. Gambar 5 menunjukkan bahwa tingkat konvergensi DJPRL dengan KKP memiliki tingkat kesamaan terhadap tujuan paling kuat yang artinya bahwa, ketika kedua pemangku kepentingan memiliki komitmen membangun kerjasama maka semakin besar kemungkinan keberhasilan dalam pengembangan Kepulauan Widi. Koneksi antara pusat melalui KKP, DKP, PEMDA dan LSM dapat menjadi kolaborasi dari hulu ke hilir dalam penerapan dan pengawasannya.



Gambar 5. Konvergensi (3CAA) antar pemangku kepentingan

Selain menganalisa konvergensi antar pemangku kepentingan, mactor juga dapat menganalisa divergensi antar pemangku kepentingan. Divergensi antar pemangku kepentingan memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan (posisi) antar pemangku kepentingan terhadap tujuan, sehingga dapat diketahui adanya kemungkinan ketidaksetujuan atau potensi konflik diantara para pemangku kepentingan tersebut. Divergensi antar pemangku kepentingan dalam keberhasilan

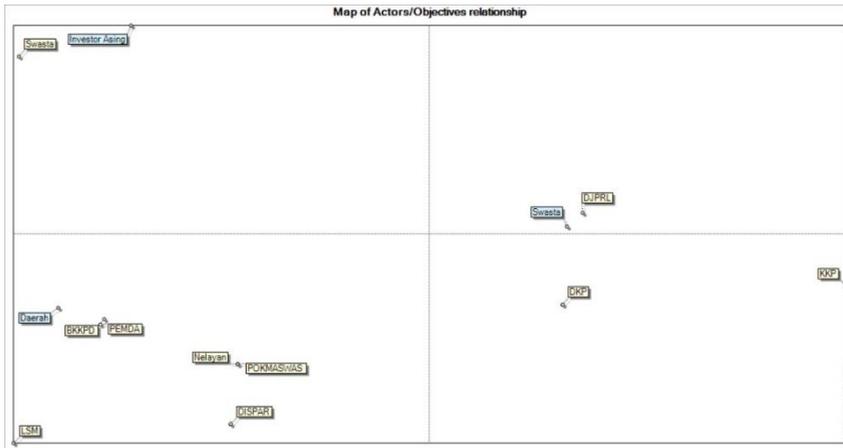
pengembangan kepulauan Widi dapat dilihat pada Gambar 6. Nilai divergensi paling besar pada Gambar 6 adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta yang dihubungkan dengan garis merah. Hal tersebut menjelaskan bahwa, terdapat unsur kepentingan yang saling berlawanan di antara kedua pemangku kepentingan yang memperlihatkan potensi adanya konflik terhadap suatu kepentingan. Hal tersebut didasarkan pada konteks ideologi yang berbeda antara LSM yang menganut pada rasionalitas ekologi sosial sedangkan pihak pengusaha mengedepankan pada keuntungan ekonomi [16]. Penting untuk diperhatikan juga pada hubungan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan swasta yang dihubungkan dengan garis biru tebal yang mengindikasikan adanya peluang konflik meskipun belum pada level merah namun hal tersebut harus menjadi perhatian.



Gambar 6. Divergensi (3DAA) antar pemangku kepentingan

Analisa terakhir terpaut dengan ikatan tiap- tiap pemangku kepentingan pada tujuan. Hubungan pemangku kepentingan pada tujuan ialah informasi yang urgen, sebab hal tersebut hendak memperlihatkan ke tujuan mana pemangku kepentingan berpusat sehingga bersedia memakai kekuatannya guna mewujudkan tujuannya.

Keseriusan tindakan pemangku kepentingan terhadap tujuan pada pengembangan Kepulauan Widi ditunjukkan oleh denah ikatan antara pemangku kepentingan dengan tujuan pada Gambar 7.



Gambar 7. Hubungan Pemangku kepentingan dengan Tujuan

Dari peta hubungan *stakeholder* pada gambar 7, terlihat bahwa pihak swasta merupakan pemangku kepentingan yang sangat mensupport, fokus, kuat dukungannya terhadap tujuan pengembangan Kepulauan Widi oleh investor asing. Hal tersebut karena pihak swasta (pengusaha) membutuhkan investor baru, dengan obyek hak pengelolaan dan pemanfaatan dimana perusahaan sebagai penjual telah memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan [17]. Sementara itu, KKP, DJPRL, dan DKP paling mendukung terhadap tujuan pengembangan Kepulauan Widi oleh swasta. Sedangkan BKKPD, PEMDA, LSM, DISPAR, POKMASWAS, dan nelayan fokus pada pengembangan Kepulauan Widi oleh daerah guna pengelolaan yang lebih berkelanjutan.

4 Kesimpulan

Hasil mactor menunjukkan bahwa pemangku kepentingan kunci yang mempunyai pengaruh besar dan ketergantungan yang rendah adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan swasta. Kemudian pemangku kepentingan yang memiliki tingkat pengaruh dan ketergantungan yang besar adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), Balai Kawasan

Konservasi Perairan Daerah (BKKPD), Pemerintah Daerah (PEMDA). Sedangkan pemangku kepentingan yang tingkat ketergantungan besar dan pengaruh rendah adalah Dinas kelautan dan perikanan (DKP), Dinas Pariwisata (DISPAR), Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), dan nelayan.

5 Saran

Berdasarkan keunggulan pengembangan Kepulauan Widi yang dikelola oleh daerah, perlu adanya komitmen bersama semua pihak dalam rangka pemaksimalan potensi sumber daya alam di Kepulauan Widi secara berkelanjutan dan dapat berdampak positif bagi aspek ekonomi, ekologi dan juga sosial.

6 Referensi

- [1] Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, "Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Widi Dan Perairan Sekitarnya Provinsi Maluku Utara 2020 – 2040," Maluku Utara: DKP Kp, 2020.
- [2] A. Muttaqin, S. Pardede, S. Tarigan, A. Setiawan, and F. Muhidin, "Kajian Ekologi Terumbu Karang Kawasan Konservasi Perairan Daerah Maluku Utara Tahun 2017," Wildlife Conservation Society - Indonesia Program. Bogor, Indonesia, 2017.
- [3] Leadership of Island Indonesia, "Preliminary report, Marine Ecosystem of Widi Islands. North Mollucas," Indonesia, 2018.
- [4] Umar, "Potensi Ekowisata Bahari dan Pulau Pulau Rendah di Kabupaten Halmahera Selatan. Journal Geografi," 2018.
- [5] A. Prabaning Tyas, "Tanggung Gugat Atas Jual Beli Pulau Lantigiang Berdasarkan Syarat Sah Nya Perjanjian," Jurnal Selat, vol. 8, no. 2, pp. 172–186, May 2021, doi: 10.31629/selat.v8i2.3387.
- [6] K. Warakania Ardhanawari, "PENGATURAN HUKUM TERKAIT PERSELISIHAN JUAL BELI PULAU LANTIGIANG," 2022. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/regional/read/4472541/kronologi-penjualan->
- [7] Hasan A Yulia, "Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia," Prenada Media, 2020, ISBN:623-218-346-0.
- [8] A. Fauzi, "Teknik analisis keberlanjutan (1st ed.)," Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- [9] G.H. Rees, and S.iMacDonell, "Data gathering for actor analyses: A research note on the collection and aggregation of individual respondent data for MACTOR. Future Studies Research Journal: Trends and Strategies," 9(1), 115–137, 2017.

- [10] H. Rahma, "Fenomena natural resource curse dalam pembangunan wilayah," 2019.
- [11] R. Laili Hasibuhan, "TINJAUAN HUKUM TENTANG PENJARAHAAN PULAU TERLUAR INDONESIA," 2018.
- [12] Elmsalmi and Hachicha, "Risk Mitigation Strategies According to the Supply Actors' Objectives through MACTOR Method. Paper Presented for International Conference on Advanced Logistics and Transport," 2014.
- [13] A. Gustina and A. R. Gustina Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, "Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil oleh Orang Asing dan Kedaulatan Maritim di Indonesia: Antara Regulasi dan Implikasi," 2014. [Online]. Available: <http://www.privateislandsonline.com>
- [14] Ambo Tuwo, "Pendekatan Ekologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, dalam buku Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia," Jakarta: IPB Press, hml. 147, 2019.
- [15] M. Khairi, "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulaupulau Kecil, JATISWARA, vol. 35, no. 3, Nov 2020.
- [16] A. Lukman, H. Ilmu, A. Niaga, S. Tinggi, and I. A. Banten, "KAJIAN KEBIJAKAN SUMBERDAYA ALAM BERBASIS PADA EKOLOGI POLITIK," 2018.
- [17] Arif Miftahul Aziz, "Penjualan Pulau-pulau Kecil: Antara Terminologi dan Regulasi," 2023.